



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 April 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI
SUB UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTOYO**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **166346**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.430.569.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/152 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 208.350.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1225 m²/256 m² di KOTA METRO , HIBAH TANPA AKTA Rp. 313.112.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/152 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 818.432.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m²/54 m² di LAMPUNG TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 42.752.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m²/54 m² di KOTA METRO , HIBAH TANPA AKTA Rp. 117.912.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m²/105 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 678.015.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m²/332 m² di TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.856.220.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/200 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 395.776.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 910.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, JEEP WILYS JEEP Tahun 1960, HASIL SENDIRI Rp.



60.000.000

4. MOTOR, HARLEY DAVIDSON HARLE Tahun 2012, HASIL

SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

2.666.659.326

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

8.007.228.326

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.007.228.326

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 November 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.